

# **REVITALISASI DIMENSI BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI MADURA MELALUI PERAN KIAI DAN PESANTREN**

**M. Fajar Shodiq Ramadlan**

Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No. 4-6 Surabaya

e-mail: fajarramadlan@gmail.com

## **Abstrak:**

Sebagai sebuah entitas yang terus berkembang dengan sistem sosial budaya yang khas, unik dan partikular, diskursus pembangunan ekonomi dan masyarakat di Madura mendapat perhatian khusus, terutama sejak bergulirnya wacana industrialisasi dan berdirinya jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Dalam dinamika gagasan pembangunan ekonomi dan masyarakat, pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang memiliki orientasi ke masa depan. Gagasan paling kontemporer mengenai pembangunan berkelanjutan menem-patkan dimensi budaya sebagai pilar sentral dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat. Dalam konteks budaya, Islam, dan pembangunan ekonomi di Madura, menempatkan dimensi kebudayaan dalam paradigma pembangunan berkelanjutan tentu menjadi penting di tengah tantangan industrialisasi. Apalagi, di samping upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi, aspek budaya, nilai-nilai keislaman, dan struktur sosial yang telah terbangun, juga diharapkan tetap terjaga. Cara yang bisa ditempuh untuk mencapainya adalah melalui keterlibatan peran kiai dan pesantren di Madura, yang dapat berfungsi sebagai agen dan lembaga yang mempunyai akar di masyarakat Madura.

## **Abstract:**

As an evolving entity with a distinctive, unique and particular socio-cultural system, economic and public development discourse on Madura get special attention, especially since the passing of the discourse of industrialization and the establishment of Surabaya-Madura bridge (Suramadu). In the dynamics of economic and community development ideas, sustainable development is a concept that has a future orientation. The most contemporary ideas about the cultural dimensions of sustainable development put culture as a central pillar in the economic and community development. In the context of culture, Islam and economic development in Madura, placing dimensions of culture in sustainable development paradigm is certainly important in the challenge of industrialization. Moreover, in addition to efforts to create economic growth, aspects of culture, Islamic values and social structures that had been built are also expected to be maintained. The way that can be taken to achieve it is through the involvement of *kiai* and the role of *pesantren* in Madura, which can serve as agents and agencies who have roots in the community Madura.

## **Kata Kunci:**

Budaya, pembangunan berkelanjutan, kiai, pesantren

## Pendahuluan

Sebagai sebuah entitas yang terus berkembang dengan sistem sosial budaya yang khas, unik dan partikular, diskursus pembangunan ekonomi dan masyarakat Madura mempunyai perhatian khusus, terutama sejak bergulirnya wacana industrialisasi dan berdirinya jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Diskursus ini memberi daya tarik tersendiri, terlihat dari begitu banyak gagasan pembangunan Madura yang ditulis oleh berbagai ahli.

Tulisan ini merupakan gagasan konseptual tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan dan penerapannya di masyarakat, terutama masyarakat Madura, yang mempunyai keunikan budaya dan tradisi di dalamnya. Kerangka pemikiran dalam tulisan ini merupakan hasil studi literatur dari berbagai artikel dan hasil penelitian yang dihimpun.

Dewasa ini, pembangunan perekonomian di tingkat lokal memang relatif beragam. Selain lembaga-lembaga ekonomi swasta, dengan tingkat modal yang relatif besar, ada pula koperasi-koperasi yang tersebar di berbagai wilayah hingga ke pedesaan. Menempatkan kiai dan pesantren dalam pembangunan ekonomi menjadi sesuatu alternatif pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Gagasan konseptual dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk alternatif pembangunan ekonomi masyarakat dengan melibatkan unsur budaya dan aspek partikular lain di masyarakat. Sehingga, tergali kearifan lokal yang menjadi landasan dan pijakan dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Diskursus pembangunan ekonomi menjadi acuan dalam menciptakan

kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Ada banyak paradigma, pendekatan, dan cara memaknai pembangunan. Masing-masing memiliki perspektif bahkan mengkritik pendekatan yang lain. Dalam berbagai perspektif, ada beberapa indikator statistik yang menjadi penting dan signifikan, tak hanya untuk merancang dan menilai kebijakan yang bertujuan untuk memajukan perkembangan masyarakat, tetapi juga dalam menilai dan memengaruhi cara kerja ekonomi pasar.

Beberapa model pembangunan yang diterapkan ternyata mengalami anomali dengan kenyataan empiris. Model pembangunan Barat, misalnya, ternyata berimplikasi terhadap munculnya ketidaksetaraan dan menyebabkan keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga. Sejak Perang Dunia II, banyak negara menanggung biaya ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya yang sangat tinggi untuk mengadopsi kebijakan yang bertujuan mengejar target-target pembangunan modern Barat. Bagi penduduk pedesaan pada khususnya, model pembangunan tersebut dirasa telah menggerogoti pertanian dan sumber daya tradisional. Beberapa kritik atas model-model pembangunan juga ditarik pada perspektif imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme dikonseptualisasikan dengan cara yang berbeda, namun menggambarkan teori dan praktik yang dikembangkan oleh “pusat metro-politan” yang dominan untuk memengaruhi dan mendominasi wilayah yang jauh, baik dengan kekerasan maupun dengan cara politik atau melalui ketergantungan ekonomi, sosial, dan budaya<sup>1</sup>. Struktur dan proses ekonomi

---

<sup>1</sup> Susan Baker, *Sustainable Development* (New York: Routledge, 2006), hlm. 159.

yang timpang ini kemudian memunculkan ketergantungan bagi negara-negara pinggiran atau negara Dunia Ketiga.

Kritik pada konsep-konsep di dalam pembangunan kemudian juga mengalami perkembangan, terutama ketika pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya menimbulkan dampak negatif. Hal itu tampak terutama pada sistem ekologi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Pembangunan di banyak negara, industri berlangsung “liar”, mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan dampak yang timbul terhadap beberapa aspek kehidupan dan masa depannya.

Pada saat itulah muncul gagasan tentang “pembangunan berkelanjutan”. Konsep tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mulai ramai dibicarakan sejak tahun 1970-an melalui laporan “*The Club of Rome*”, yang menaruh perhatian pada konsekuensi lingkungan dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung pesat.

Bentuk yang lebih substansial tentang konsep pembangunan berkelanjutan muncul pada tahun 1987 melalui laporan Komisi Brundlant atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development/WCED*). WCED berpendapat bahwa eksploitasi sumber daya di negara industri mengancam sistem ekologi, dan menjadi kontributor langsung pada masalah kemiskinan dan ketertinggalan di negara berkembang. WCED melihat adanya konsekuensi jangka panjang dan menganjurkan penerapan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yang didefinisikan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemam-

puan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”<sup>2</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan terus mengalami perkembangan. Pada awal 1990-an, ada lebih dari 70 definisi mengenai konsep ini dari berbagai disiplin ilmu. Masing-masing membuat asumsi yang berbeda mengenai relasi dasar antara masyarakat dan alam. Kebanyakan definisi pembangunan berkelanjutan mencakup gagasan bahwa ada tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang saling bergantung satu dengan yang lain, yakni: lingkungan, ekonomi dan sosial.<sup>3</sup> Pembangunan harus ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan, pemerataan, dan efisiensi kapital (tujuan ekonomi). Di sisi lain, pembangunan pun tidak boleh mengabaikan ekosistem, sehingga integritas ekosistem, daya dukung lingkungan, dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Selain itu, pembangunan juga seharusnya memperhatikan tujuan sosial, seperti pemberdayaan masyarakat, partisipasi, mobilitas sosial, kepaduan/koheisi sosial, pengakuan akan identitas budaya, dan pengembangan kelembagaan.

Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, beberapa unsur penting harus diperhatikan. Dalam upaya mencapai tujuan ekonomi dan tujuan sosial secara sinergis, misalnya, maka perlu dijalankan distribusi pendapatan yang relatif merata, penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, pemberian bantuan/pe-

<sup>2</sup> David Throsby, “Culture In Sustainable Development: Insights for The Future Implementation of Art”, dalam 13’, *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Paris: UNESCO, 2008), hlm. 2.

<sup>3</sup> Jennifer A. Elliot, *An Introduction to Sustainable Development* (New York: Routledge, 2006), hlm. 9.

layanan kepada kelompok tertentu, peningkatan kesempatan kerja, dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan ekonomi dan ekosistem, maka setiap aktifitas pembangunan perlu memperhitungkan dan mengevaluasi dampak lingkungan. Sumberdaya alam yang digunakan pun harus dinilai, diukur, dan diperhitungkan untuk mencegah eksploitasi lingkungan/alam secara semena-mena.

### **Dimensi Budaya sebagai Pilar Keempat dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam perkembangannya, paradigma pembangunan berkelanjutan selanjutnya tak hanya berbicara tentang kondisi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Perhatian khusus diberikan pada dimensi budaya (*culture*), yang selanjutnya menjadi pilar keempat dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Pemikiran ini mulai berkembang pada tahun 1995, melalui publikasi Komisi Dunia untuk Kebudayaan dan Pembangunan (*World Commission on Culture and Development/WCCD*).<sup>4</sup> WCCD berargumen bahwa dimensi budaya merupakan bagian penting dari paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia.

UNESCO kemudian menjabarkan lebih luas gagasan ini melalui dua edisi laporannya yang diterbitkan pada tahun 1998 dan 2000. Argumen WCCD yang menyangkut sentralitas budaya dalam relevansi kebijakan pembangunan mempunyai perhatian yang lebih besar pada konferensi internasional tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1998. 150 negara setuju untuk menjadikan dimensi budaya sebagai

salah satu komponen kunci dari strategi pembangunan.<sup>5</sup> Konferensi tersebut mengusulkan bahwa pemerintah harus mengakui budaya sehingga kebijakan tentang kebudayaan menjadi salah satu komponen utama pembangunan berkelanjutan.

Sejak lama, budaya telah dipandang sebagai komponen dari dimensi sosial pembangunan keberlanjutan atau sebagai bagian dari diskusi tentang modal sosial. Pada akhirnya, dimensi budaya tidak hanya diperhatikan karena secara ekologis dan budaya setiap masyarakat memiliki keunikan atau partikularitas, tetapi juga karena masyarakat memiliki tempat spesifik berbasis kebutuhan dan prasyarat tertentu dalam kehidupannya. Sebuah masa depan yang berkelanjutan, dan bagaimana menuju ke sana, harus menjelaskan nilai-nilai, persepsi, dan kemampuan lokal, bukan hanya apa yang diasumsikan oleh orang luar atau keinginan pembuat kebijakan.<sup>6</sup> Jika, selama ini kita mengenal tiga pilar dalam konsep pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, politik, dan ekonomi, penambahan budaya sebagai pilar keempat dikarenakan ketiga pilar yang ada dinilai tidak akan bisa diterapkan secara komprehensif tanpa pengelolaan budaya yang baik.

Dimensi budaya secara bertahap diakui memiliki peran yang khusus dan tidak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan. Budaya dalam hal ini dilihat sebagai "cara hidup bersama", sistem yang menandakan "melalui mana tatanan sosial yang dikomunikasikan, direproduksi, dialami, dan dieksplo-

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 4

<sup>6</sup> Robert E. Rhoades, *Development with Identity: Community, Culture, and Sustainability in the Andes* (Oxfordshire: CABI Publishing, 2006), hlm. 12

---

<sup>4</sup> Throsby, "Culture in Sustainable", hlm, 2.

ras".<sup>7</sup> Dalam bidang pengembangan masyarakat, budaya didefinisikan secara luas sebagai "seluruh kompleks dari kekhasan spiritual, material, intelektual, dan fitur emosional yang menjadi ciri suatu masyarakat atau kelompok sosial. Ini mencakup tidak hanya seni dan surat-surat, tetapi juga mode kehidupan, hak-hak fundamental dari manusia, sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan".<sup>8</sup>

Cara pandang ini memiliki implikasi tersendiri dalam merekonstruksi konsep pembangunan. Jika pembangunan cenderung menekankan pada dimensi pertumbuhan ekonomi, maka budaya dipandang hanya sebatas instrumen. Budaya bukan sesuatu yang berharga dalam dirinya sendiri, melainkan hanya alat untuk mempromosikan dan mempertahankan kemajuan ekonomi.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah budaya dalam pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai sarana saja, atau juga turut menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Dimensi budaya dalam kehidupan manusia mungkin saja menjadi lebih penting daripada pertumbuhan. Pendidikan, misalnya, dalam beberapa hal turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pendidikan dapat bernilai instrumental. Pada saat yang sama juga merupakan bagian penting dari pembangunan budaya, dengan nilai intrinsik. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjadikan budaya pada posisi sebatas

pendukung pertumbuhan ekonomi.<sup>9</sup> Paradigma dimensi kebudayaan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan menjadi penting karena akan berkaitan dengan orientasi pembangunan dan pembuatan kebijakan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memunculkan gagasan baru dalam perkembangan wacana pembangunan berkelanjutan. Budaya tidak saja menjadi pilar keempat pembangunan berkelanjutan, tetapi justru menjadi pilar sentral. Dimensi budaya harus dilihat tidak hanya sebagai pilar tambahan pembangunan berkelanjutan bersama dengan lingkungan, ekonomi dan sosial, tetapi juga karena budaya menjadi identitas masyarakat, menandakan sistem, kosmologi, dan kerangka epistemologi bagaimana lingkungan dipandang dan terlibat dalam kehidupan. Budaya memberi makna tentang pembangunan dan menentukan bagaimana orang bertindak di dunia.<sup>10</sup>

Ketika budaya dipahami dalam menunjukkan produksi sosial dan transmisi nilai-nilai; makna dan tujuan, serta diakui bahwa sebagai ekspresi atas tujuan dan aspirasi sosial dan inti dari proses perencanaan masyarakat, maka hubungan antara budaya dan perencanaan menjadi jelas. Begitu juga halnya potensi untuk penggunaan budaya sebagai elemen inti dalam mekanisme yang memfasilitasi perencanaan publik yang efektif.<sup>11</sup> Vitalitas budaya menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial, bertanggung

<sup>7</sup> Keith Nurse, "Culture as the Fourth Pillar of Sustainable Development", *Small States: Economic Review and Basic Statistics*, Vol. 11, (January, 2007), hlm. 34.

<sup>8</sup> UNESCO, *The Cultural Dimension of Development: Towards a Practical Approach* (Paris: UNESCO Publishing, 1995), hlm. 22.

<sup>9</sup> WCCD, *Diversity: Summary Version* (Paris: WCCD, 1996), hlm. 14.

<sup>10</sup> Nurse, "Culture as the Fourth Pillar", hlm. 37.

<sup>11</sup> Jon Hawkes, *The Fourth Pillar of Sustainability: Culture's Essential Role in Public Planning* (Melbourne: Common Ground, 2001), hlm. 1.

jawab atas lingkungan, dan kelayakan ekonomi.

Menempatkan dimensi budaya dalam pembangunan juga mencakup berbagai manfaat non ekonomi, seperti inklusivitas sosial yang lebih besar dan berakar, ketahanan, inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan bagi individu dan masyarakat, serta penggunaan sumber daya lokal, keterampilan, dan pengetahuan. Memberi penghormatan dan dukungan terhadap ekspresi-ekspresi kebudayaan berkontribusi untuk memperkuat modal sosial dari masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan di lembaga publik.<sup>12</sup>

Lebih jauh, faktor budaya turut memengaruhi gaya hidup, perilaku individu, pola konsumsi, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, dan interaksi masyarakat dengan lingkungan. Identifikasi nilai-nilai, praktik, dan identitas adalah prasyarat untuk pengembangan dari kemanusiaan, yang memiliki peran yang signifikan membentuk hubungan dan membangun sebuah jaringan dengan lingkungan sekitarnya.<sup>13</sup> Sistem pengetahuan lokal dan masyarakat adat dan praktik pengelolaan lingkungan memberikan wawasan dan alat yang berharga untuk mengatasi tantangan-tantangan ekologis, mencegah punahnya keanekaragaman hayati, mengurangi degradasi lahan, dan diyakini turut mengurangi dampak perubahan iklim.

## Budaya dan Pembangunan di Madura

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Identitas budaya tersebut dianggap sebagai deskripsi dari generalisasi jati diri individual maupun komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan.<sup>14</sup> Pandangan ini memberi tempat bagi entitas etnik Madura sebagai komunitas dengan karakteristik partikular dan berbeda dengan etnik lain dalam bentuk maupun jenis etnografinya.

Sejak lama, religiusitas masyarakat etnik Madura telah dikenal sebagai bagian dari keberagaman kaum Muslim Indonesia, di mana realitas sosial budayanya dibentuk dan berpegang teguh pada tradisi dan ajaran Islam. Dalam banyak literatur tentang Madura, hal tersebut terbentuk dari proses sejarah yang panjang, yang turut memengaruhi secara signifikan sistem sosial budaya.

Sistem sosial budaya tersebut kemudian mendapat tantangan besar ketika Madura berhadapan dengan pembangunan ekonomi. Berbicara pembangunan ekonomi di Madura dalam satu dekade terakhir, tentu tak lepas dari wacana industrialisasi. Tak dapat dipungkiri, wacana ini makin mengemuka pasca dibangunnya jembatan Suramadu.

Wacana industrialisasi di Madura sebenarnya juga sudah mencuat sejak digulirkannya Keputusan Presiden (Kepres) No. 50 Tahun 1990 tentang Rencana Pembangunan Jembatan Suramadu dalam rangka percepatan pembangunan di Madura. Perubahan

---

<sup>12</sup> UNESCO, *Culture: A Driver and an Enabler of Sustainable Development* (UNESCO, 2012), hlm. 4.

<sup>13</sup> Inta Kotane, "Culture as an Element of Sustainable Development and Urban Attraction Capacity", *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, Vol. 26, No. 2 (2011), hlm. 118.

---

<sup>14</sup> Taufiqurrahman, "Islam dan Budaya Madura", bahan presentasi pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, Bandung, 26-30 November 2006, hlm. 2.

tersebut dirasa memberi dampak besar bagi sistem sosial budaya Madura. Lompatan kebudayaan bagi pulau dengan seribu pesantren pada saat itu memberi bayangan yang dirasa cukup mengkhawatirkan. Bayangan itu muncul berkembang dengan ketakutan tersingkirnya warga Madura dan nilai-nilai tradisional Madura.

Secara teoritis, industrialisasi, sebagai bagian dari modernisasi, merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memperbanyak jumlah kelas menengah, dan sebagainya. Industrialisasi bahkan menjadi kata kunci dalam paradigma pembangunan negara-negara modern di dunia ketiga. Namun, sebagai sebuah pola hidup “baru” dan “asing”, industrialisasi tidak selalu diterima begitu saja, dan tidak selalu dapat dengan segera menggantikan pola hidup “lama” dan “menyatu” pada kehidupan masyarakat.

Dinamika yang terjadi lebih dari dua dekade di Madura dalam wacana industrialisasi, tidak cukup kuat membawa kita pada kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan pertanda bahwa masyarakat Madura belum siap untuk menerima perubahan, belum siap meninggalkan pola kehidupan lama, lalu menggantinya dengan pola kehidupan baru yang belum jelas arah dan bentuknya. Masalah paling pokok bagi masyarakat-masyarakat yang sedang menjadi sasaran bagi penerapan teknologi/industri sebenarnya adalah kejelasan status dari struktur sosial mereka dalam pola kebudayaan industri itu.<sup>15</sup> Poin penting dari hal ini adalah

bahwa warga Madura tidak mau hanya menjadi warga pasif, sekedar menjadi penonton, yang kemudian termarginalkan dari tanah mereka sendiri.

Sejak lama Madura lama diasosiasikan dengan atribut kemiskinan dan keterbelakangan. Atribut itu diperoleh karena kondisi alam Madura yang gersang dan tandus, sehingga daya dukung alam, khususnya sektor pertanian, terhadap penduduk tidak memadai.<sup>16</sup> Namun dengan ditemukannya sumber daya alam, khususnya kandungan minyak dan gas di Madura dan pulau-pulau di sekitarnya, serta dibangunnya jembatan yang menghubungkan Surabaya-Madura (Suramadu), Madura mempunyai peluang besar untuk menghapus atribut negatif yang dimilikinya. Meski dalam kenyataan, upaya membangun industrialisasi di Madura bukanlah pilihan mudah untuk dilaksanakan.

Industri pada hakikatnya adalah penerapan Iptek modern secara ekonomis dan merupakan persoalan sosialisasi kebudayaan yang terkait dengan aspek makro lain, serta implikasi sosial yang menyertainya. Industrialisasi di banyak daerah tak hanya memicu perkembangan mobilitas barang dan jasa, tetapi juga manusia. Integrasi atas barang-barang pasar, didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi, membuka peluang pertukaran sosial di antara warga yang hidup dari tempat yang berbeda.<sup>17</sup> Pertukaran sosial ini diikuti oleh interaksi budaya di antara warga. Industrialisasi pada akhirnya juga

<sup>15</sup> Andang Subahianto (ed.), *Madura Bicara PLTN* (Jember: Universitas Jember dan Kementerian Ristek RI dan Pusat Penelitian Budaya Jawa & Madura, 2004), hlm. vii.

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 2.

<sup>17</sup> Jacques Olivier, Mathias Thoenig, Thierry Vardier, “Globalization and Dynamic or Cultural Identity”, *Journal of International Economics*, Vol. 76, Issue 2, (Desember, 2008), hlm. 366.

berkenaan dengan proses sosialisasi kebudayaan yang terkait dengan aspek makro lainnya, termasuk implikasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Ada banyak pemikiran dan gagasan konstruktif dari berbagai ahli mengenai bentuk dan model pembangunan Madura. Mulai pengembangan agrobisnis, peningkatan perikanan, hingga industri yang berorientasi ekspor. Sekian gagasan tersebut berusaha mencapai skala ekonomi besar dengan kegiatan produksi lebih efisien dan pembesaran aktifitas ekonomi agar cepat tercapai target-target pertumbuhan. Meski begitu banyak pemikiran mengenai model pembangunan ekonomi Madura, hal penting yang perlu disadari adalah bahwa pembangunan ekonomi dan industrialisasi di Madura tak bisa meminggirkan nilai-nilai dan aspek budaya yang telah terbangun dan berkembang begitu lama. Ini merupakan harapan dan tuntutan yang mengemuka sejak wacana industrialisasi bergulir pada masa Orde Baru.

Upaya agar terjaganya nilai dan kultur dalam pembangunan di Madura, terefleksi pada sembilan pokok pikiran ulama BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura).<sup>18</sup> Ada beberapa poin penting yang menunjukkan perhatian terhadap dimensi kultural dan nilai-nilai di dalamnya baik secara

implisit maupun eksplisit. Di poin nomor 1, misalnya, tertulis bahwa "Pembangunan dan pengembangan Madura pada skala yang lebih besar dan luas dirasa sangat mendesak dan mutlak perlu dilaksanakan, baik pembangunan dari bawah yang dilakukan sendiri oleh masyarakat Madura maupun yang datangnya dari atas." Pada poin 3 ditulis bahwa: "Pembangunan dan pengembangan Madura sedini mungkin harus melibatkan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Madura khususnya Alim Ulama, sejak awal perencanaan, pada proses pelaksanaan, sampai pada pengelolaan dan pemanfaatannya." Melibatkan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Madura dapat dimaknai melibatkan sesuai dengan sumber daya manusia yang tersedia, serta kultur dan nilai-nilai keislaman yang telah berjalan.

Dalam sembilan pikiran pokok ulama BASSRA itu pula pesantren mendapat perhatian khusus, yakni pada poin 7, disebutkan bahwa "pembangunan agrobisnis, agroindustri, aneka industri kecil, dan industri rumahan, yang didukung oleh koperasi pesantren, adalah alternatif utama yang akan dipilih untuk mengawali pembangunan dan pengembangan Madura dari dalam, guna meningkatkan perekonomian masyarakat Madura dalam jangka pendek sebelum dilakukannya pembangunan pada skala yang lebih besar, lebih luas, dan lebih kompleks".

Meski terdiri dari beberapa poin yang secara eksplisit juga mencakup sumber daya manusia (SDM) dan bentuk industrialisasi, namun masalah yang lebih mengemuka saat itu adalah pudarnya kultur Madura. Hal ini yang lebih dikhawatirkan oleh para kiai dan ulama saat itu. Apalagi para kiai dan ulama melihat realita hilangnya kultur

---

<sup>18</sup> Sembilan pokok pikiran ulama BASSRA merupakan pandangan ulama BASSRA terkait industrialisasi Madura sebagai upaya pembangunan jangka panjang tahap II (PJPT II) yang dicanangkan oleh rezim Orde Baru. Pikiran pokok ini dirumuskan melalui serangkaian musyawarah terhadap desakan pemerintah pusat untuk segera direalisasikan industrialisasi di Madura. Ada beberapa kekhawatiran dari ulama BASSRA terkait industrialisasi, antara lain adalah persoalan moral dan keislaman.



asli masyarakat di Batam dan Cilegon karena industrialisasi. Persoalan kultur menjadi yang paling utama karena persoalan SDM dan lainnya merupakan persoalan yang mengikutinya.<sup>19</sup>

Meski dikeluarkan pada dekade 1990-an, dan latar politik yang saat itu masih otoritarian, sembilan pikiran pokok ulama BASSRA merupakan langkah maju pada zamannya. Gagasan untuk menempatkan dimensi kultural pada posisi sentral justru menjadi gagasan kontemporer pembangunan berkelanjutan saat ini.

### **Peran Kiai dan Pesantren dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Salah satu cara penerapan dimensi budaya dalam pembangunan berkelanjutan adalah melalui tokoh yang dapat berperan sebagai agen, serta melibatkan lembaga-lembaga lokal yang mengakar dan mempunyai relasi yang kuat dengan masyarakat. Melalui agen dan lembaga-lembaga tersebut, diharapkan menjadi pendorong dan wadah bagi pembangunan berkelanjutan, terutama di level lokal.<sup>20</sup>

Dalam konteks pembahasan kultur, Islam, dan pembangunan ekonomi di Madura, sulit kiranya jika meminggirkan peran kiai dan pesantren. Sebagai agen, kiai mempunyai peran panjang dalam pembangunan ekonomi di Madura, dari tingkat desa hingga pada hal-hal tentang konsep pem-

angunan secara luas. Sebagai wadah yang mempunyai akar kuat di masyarakat Madura, pesantren juga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Di negara berkembang seperti Indonesia, program-program pembangunan seringkali mengalami masalah dalam implementasi di level lokal. Banyak penjelasan mengapa fenomena ini kerap terjadi, biasanya atas dasar sifat program. Tidak ada kebijakan yang bisa efektif berjalan kecuali didasarkan pada sistem dan lembaga-lembaga yang mampu memfasilitasi pelaksanaannya.

Bagi penulis, gagasan tentang pelibatan pesantren dan kiai di masyarakat menjadi penting sebagai alternatif pembangunan yang muncul dari akar masyarakat, bukan serta merta berasal dari atas (pemerintah). Peran pemerintah bisa melalui pemberdayaan pesantren, namun dalam kerangka peranan yang terbatas. Artinya, segala praktik perekonomian merupakan tanggung jawab pesantren. Mekanisme-mekanisme di dalamnya merupakan mekanisme non formal, tidak diatur melalui aturan formal seperti lembaga lain, misalnya, koperasi.

Para pembuat dan pelaksana kebijakan perlu memastikan bahwa dalam pembangunan perlu adanya pengakuan atas peran kunci masyarakat dalam mengekspresikan makna, identitas, dan tujuan pembangunan. Dalam hal ini, kiai dan pesantren memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan di Madura.

Sebagaimana diketahui, Madura dapat dikatakan identik dengan Islam, meskipun tidak semua penduduknya beragama Islam. Islam telah menjadi bagian dari identitas etnik. Citra Madura sebagai “masyarakat santri” sangat kuat.

<sup>19</sup> Penjelasan ini diperoleh dari wawancara dengan KH. Nuruddin A. Rahman, koordinator ulama BASSRA pada tanggal 24 Maret 2013

<sup>20</sup> Ada beberapa gagasan bagaimana dimensi kebudayaan diterapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dari banyak gagasan tersebut, apa pun metode dan cara yang dipilih, keberadaan agen dan lembaga yang mempunyai jejaring kuat di masyarakat merupakan hal yang signifikan.

Identitas keagamaan Islam yang kuat di kalangan masyarakat Madura berakar dari sebuah sejarah panjang.<sup>21</sup> Karena Islam telah menjadi bagian dari identitas etnik itulah, maka tidak heran jika masyarakat Madura memiliki memiliki hubungan yang khas dengan kiai.

Kondisi tersebut kemudian melahirkan organisasi sosial yang bertumpu pada agama dan otoritas kiai. Kiai merupakan perekat solidaritas dan kegiatan ritual keagamaan, pembangunan sentimen kolektif keagamaan, dan penyatu elemen-elemen sosial atau kelompok kekerabatan. Dalam kehidupan masyarakat Madura, khususnya yang berada di daerah pedesaan, pengaruh kiai dalam hal tertentu bahkan bisa melampaui batas pengaruh institusi kepemimpinan lainnya, termasuk dalam birokrasi pemerintahan.<sup>22</sup> Meski kemudian muncul pandangan bahwa kiai tak lagi mempunyai pengaruh kuat seperti dahulu,<sup>23</sup> kiai masih menjadi pemegang

otoritas keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan orang Madura.

Sebagai pemimpin lokal, kiai mempunyai hubungan strategis dengan penduduk setempat. Dengan memertahankan dan melembagakan hubungan antara tingkat lokal dan otoritas yang lebih tinggi di bawah perintah yang diinginkan, para kiai memainkan peran yang berarti dalam proses perubahan di pedesaan. Apalagi selama pemerintah tidak memiliki kekuatan (secara relatif) untuk campur tangan dalam posisi dan peran mereka dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Para kiai di Madura memberikan gambaran pentingnya kondisi setempat dan pemimpin sosial-keagamaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan pedesaan nasional. Peran ini harus dipahami dalam konteks budaya dan sejarah. Sifat dari ikatan yang mengikat ulama dan masyarakat menentukan sikap masyarakat lokal terhadap program-program yang dirancang untuk menguntungkan desa, jika mereka tidak memiliki legitimasi di mata penduduk setempat, mereka tidak dapat dilakukan dengan lancar.

Kiai memainkan peranan yang konstruktif dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan pedesaan di Madura. Kiai di daerah pedesaan mengambil peranan yang partisipatif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Mereka kerap dimintai pertimbangan tentang pelaksanaan suatu program

---

<sup>21</sup> Andang Subahianto, et.al, *Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 53.

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 53.

<sup>23</sup> Penulis memandang bahwa fenomena pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang cenderung bersifat transaksional juga menyebabkan beberapa kiai terlibat dalam tarik menarik kepentingan. Dari beberapa diskusi dengan masyarakat di Madura, hal tersebut mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kiai dalam aspek-aspek tertentu, misalnya pilihan-pilihan politik. Hal yang sama ditulis oleh Andang Subahianto. Dalam hal politik praktis, misalnya, terjadi pergeseran pandangan masyarakat terhadap para kiai. Partisipasi kiai dalam ranah politik sering mengundang apresiasi negatif masyarakat. Seorang tokoh, yang merupakan seorang ulama, bisa saja lebih berpengaruh karena kewenangan legal-formal yang melekat pada dirinya dibandingkan dengan pengaruh karena status ke-kiai-annya. Meski demikian, kedudukan dan peranan sosial kiai

---

masih sedemikian kuat dalam kehidupan masyarakat Madura. Ibid., hlm. 59.

<sup>24</sup> Iik Arifin Mansurnoor, "Local Initiative and Government Plans: Ulama and Rural Development in Madura, Indonesia", *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 7, No. 1 (February, 1992), hlm. 86.

pembangunan.<sup>25</sup> Ini artinya, pelibatan partisipasi dan dukungan kiai terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan bagian positif yang dapat menjadi modal sosial bagi para birokrat pemerintahan, dengan didukung oleh strategi kebudayaan yang tepat dalam pelibatan pembangunan.

Kiai juga mempunyai media komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Melalui kelompok pengajian, misalnya, kiai dapat melakukan upaya pendekatan yang menstimulasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, melalui pengajian juga dapat terbentuk soliditas sosial, gotong royong, dan kontrol sosial di antara masyarakat. Peran kiai pada konteks pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pesantren.

Pesantren merupakan kelompok yang memiliki akar tradisi yang kuat dan sejarah panjang. Peran pesantren dalam pembangunan masyarakat Madura sangat besar, terutama pada level akar rumput. Bukan bermaksud untuk mengecilkan kelompok masyarakat lainnya, proses modernisasi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akan dapat lebih cepat apabila dipelopori oleh pesantren.

Hal itu disebabkan karena konstruksi sosial tentang pesantren yang mempunyai akar historis sejak masa penyebaran agama Islam, masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Realitas ini menjadikan pesantren sebagai entitas yang mempunyai kedekatan erat dengan masyarakat. Meskipun berhadapan dan terlibat dalam dinamika di masyarakat, pesantren relatif di satu sisi mampu beradaptasi, meskipun di sisi

lain ia tetap memelihara aspek partikular yang ia miliki. Hal itu juga tidak lantas menjadikan pesantren sebagai entitas yang eksklusif di masyarakat. Realitas itu justru menjadikan pesantren berperan sebagai agen perubahan.

Pesantren memiliki karakteristik keagamaan dan kemasyarakatan yang kental. Secara historis, pesantren mempunyai kedekatan erat dengan masyarakat, terutama pada kalangan pedesaan. Pendidikan pesantren menjadi tumpuan utama karena dekat, murah dan dapat dipercaya untuk mengubah melalui pengetahuan keagamaan.<sup>26</sup>

Dalam sembilan pokok pikiran ulama Bassra, terdapat poin yang secara eksplisit menempatkan pesantren sebagai bagian penting pembangunan Madura, yang berbunyi: "Perlu sedini mungkin dilakukan penyiapan Sumber Daya Manusia Madura (SDMM) yang berkualitas dan profesional dengan melibatkan secara aktif dan maksimal lembaga pendidikan pondok pesantren di Madura yang pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional, bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan."

Melibatkan pesantren dalam pembangunan menjadi pendekatan yang relevan dalam pemberdayaan dan penguatan *civil society*.<sup>27</sup> Dengan akar

<sup>26</sup> Fathol Haliq, "Pendidikan Pesantren di Tengah Tantangan Politisasi dan Globalisasi: Pesantren Madura Setelah Keruntuhan Orde Baru", *Jurnal KARSA STAIN Pamekasan*, Vol. 15, No. 1, (April, 2009), hlm. 69.

<sup>27</sup> Dalam tulisan ini, *civil society* dapat dipahami sebagai suatu agregat dari lembaga yang anggotanya terlibat terutama dalam kompleksitas kegiatan non-negara --produksi ekonomi dan budaya, kehidupan rumah tangga dan asosiasi sukarela-- dan yang dengan cara tersebut melestarikan dan mengubah identitas mereka dengan mengadakan segala macam tekanan atau

<sup>25</sup> Subahariantono, et.al, *Tantangan Industrialisasi Madura*, hlm 59

tradisi yang kuat, pesantren dapat menjadi wadah pemberdayaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Apalagi dengan kekuatannya sebagai sebuah lembaga yang mempunyai integritas kuat dan ketersediaan sumber daya yang ada di dalamnya, pesantren menjadi basis pemberdayaan ekonomi rakyat.<sup>28</sup> Sebagai lembaga pemberdayaan dan pengabdian masyarakat, pesantren mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam menjalankan peran, fungsi, kekuatan, dan potensi yang dimilikinya dalam pembangunan masyarakat.

Dalam konteks revitalisasi budaya dalam pembangunan berkelanjutan, pesantren sebagai lembaga pendidikan juga berperan mereproduksi kebudayaan. Tidak hanya memertahankan kebudayaan, tetapi juga menyebarkan, mengembangkan, dan memperbaiki budaya dalam upaya menciptakan pembangunan masyarakat. Peran ini juga menjadikan pesantren sebagai agen kebudayaan dalam masyarakat.

Peran institusi atau organisasi keagamaan dalam pembangunan berkelanjutan, seperti gerakan lingkungan oleh pesantren, misalnya, memang secara luas belum banyak terpublikasikan, terutama melalui penelitian atau survey yang mendalami kemunculan gerakan-gerakan lingkungan. Bank Dunia (*World Bank*) dalam *Country Environmental*

*Analysis* 2009 berjudul *Investing in a More Sustainable Indonesia* menulis bahwa institusi agama secara tradisional tidak diketahui perannya dalam merepresentasikan aspirasi publik atau membentuk opini publik pada isu-isu lingkungan.<sup>29</sup>

Padahal, sejatinya gerakan tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Beberapa pesantren pada 1980-an telah melakukan berbagai macam gerakan, meskipun tidak secara spesifik dalam mengatasi problematika lingkungan, tetapi upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan. Sebagai contoh, pesantren Annuqayah di Guluk-guluk Madura, pesantren Pabelan di Magelang, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Di pesantren Annuqayah, misalnya, terdapat lembaga Biro Pengabdian Masyarakat (BPM) Pondok Pesantren Annuqayah, yang berdiri pada 1979. Lembaga ini mempunyai peran besar terutama dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>31</sup> Dalam profil pesantren Annuqayah, dijelaskan bahwa BPM membentuk kelompok-kelompok masyarakat binaan yang terdiri dari petani, pengrajin dan pedagang kecil dengan memberikan pendidikan pola-pola pertanian inovatif, ketrampilan dan bentuk-bentuk kerajinan baru, serta kredit bahan pertanian

---

kontrol atas lembaga negara. Lihat Zxue Tai, *The Internet in China Cyberspace and Civil Society* (London: Routledge, 2006), hlm. 38.

<sup>28</sup> Surya Supi, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren: Studi untuk Mengembangkan Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara* (Thesis Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta, 2009), hlm. 2.

---

<sup>29</sup> World Bank, *Investing in a More Sustainable Indonesia: Country Environmental Analysis 2009* (Jakarta: World Bank Group, 2009) hlm. 44.

<sup>30</sup> Husnul Khitam, *Manifestasi Nilai Teologi dalam Gerakan Ekologi: Studi Kasus di Pesantren Al-Amin Sukabumi dan Pesantren Daarul Ulum Lido Bogor* (Thesis pada Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor, 2011), hlm. 69.

<sup>31</sup> Bambang Budiwiranto, *Pesantren and Participatory Development in Indonesia*. Thesis pada Faculty of Asian Studies of the Australian National University, (Canberra: Australian National University, 2007), hlm. 89.

dan insentif modal tanpa bunga. BPM secara intensif juga memanfaatkan media-media komunikasi tradisional masyarakat, seperti pengajian, untuk menyampaikan misi-misi pembinaannya.<sup>32</sup>

Contoh ini setidaknya secara jelas menunjukkan peran kiai dalam pembangunan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan terutama di tingkat masyarakat lokal. Melalui peran kiai dan pesantren, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terintegrasi dengan sistem sosial budaya yang telah mengakar dan mewarnai kehidupan sehari-hari.

## Penutup

Baik budaya maupun pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang dinamis. Keduanya menjadi instrumen sekaligus hasil dari sebuah perubahan. Apa yang terjadi saat ini, merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang terjadi pada 25 tahun yang lalu. Apa yang direncanakan dan kerjakan hari ini juga memengaruhi apa yang terjadi 50 tahun ke depan. Ini yang menjadikan pembangunan berkelanjutan menjadi penting dalam pembangunan masyarakat.

Menempatkan dimensi budaya dalam pembangunan berkelanjutan

<sup>32</sup> Anonim, "Ponpes Annuqayah Sumenep", *Pengurus Pusat Rabithath Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama*, 4 Mei 2012: <http://www.rmi-nu.or.id/2012/05/ponpes-annuqayah-sumenep.html>. Diakses tanggal 20 Mei 2013. Pendirian BPM tidak terlepas dari peran kiai, yakni Kiai Abadul Bastih dan Ustad Syafi'i Anshary. Peran kiai dalam lembaga tersebut dinilai cukup penting. Banyak di antara mereka yang menjadi kepala BPM, seperti KH Tsabit Khazin dan KH A Hamidi Hasan, yang juga merupakan keluarga pesantren. Lihat Budiwiranto, *Pesantren and Participatory*, hlm. 89.

memang bukan segala-galanya dalam pembangunan. Dimensi budaya merupakan bagian kecil, tetapi menjadi bagian penting dalam memformulasi pembangunan. Kita membutuhkan pembangunan ekonomi untuk bertahan hidup, tetapi kita juga patut mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang juga penting bagi generasi mendatang.

Menjadikan dimensi kebudayaan sebagai pilar sentral pembangunan berkelanjutan, perlu menjadi bagian dari kerangka berpikir untuk menciptakan kebijakan pembangunan. Keterlibatan agen-agen dan lembaga-lembaga yang mempunyai akar di masyarakat merupakan salah satu cara untuk menempatkan dimensi kebudayaan dalam paradigma pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks Madura dan nilai-nilai lokal di dalamnya, termasuk nilai ke-Islaman yang menjadi corak khas, pelibatan pesantren dan kiai merupakan alternatif dalam membangun ekonomi masyarakat. Tradisi yang mengakar dan relasi yang terbangun sejak lama, serta peran sentral kiai dan pesantren dalam masyarakat, merupakan pilihan pembangunan masyarakat yang perlu dikembangkan, khususnya bagi para pembuat kebijakan.[]

## Daftar Pustaka

Anonim. "Ponpes Annuqayah Sumenep", *Pengurus Pusat Rabithath Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama*, <http://www.rmi-nu.or.id/2012/05/ponpes-annuqayah-sumenep.html>. Diakses tanggal 20 Mei 2013).

Budiwiranto, Bambang. *Pesantren and Participatory Development in Indonesia*. Thesis MA. pada Faculty of Asian Studies of the Australian

- National University, Canberra, 2007.
- Baker, Susan. *Sustainable Development*. New York: Routledge, 2006.
- Elliot, Jennifer A. *An Introduction to Sustainable Development*. New York: Routledge, 2006.
- Hawkes, Jon. *The Fourth Pillar of Sustainability: Culture's Essential Role in Public Planning*. Melbourne: Common Ground, 2001.
- Khitam, Husnul. *Manifestasi Nilai Teologi dalam Gerakan Ekologi: Studi Kasus di Pesantren Al-Amin Sukabumi dan Pesantren Daarul Ulum Lido Bogor*. Thesis pada Sekolah Pascasarjana, Institute Pertanian Bogor, 2011.
- Kotane, Inta. 'Culture as an Element of Sustainable Development and Urban Attraction Capacity', *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, Vol. 26, No. 2, (2011), hlm. 109-123.
- Mansurnoor, Iik Arifin. 'Local Initiative and Government Plans: Ulama and Rural Development in Madura, Indonesia', *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 7, No. 1, (February, 1992), hlm. 74-89
- Nurse, Keith, 'Culture as the Fourth Pillar of Sustainable Development', *Small States: Economic Review and Basic Statistic*, Vo 11, ( January, 2007), hlm. 23-37.
- Olivier, Jacques Olivier, Mathias Thoenig, Thierry Vardier, 'Globalization and Dynamic or Cultural Identity', *Journal of International Economics*, Vol. 76, Issue 2, (Desember, 2008), hlm. 356-369.
- Rhoades, Robert E. *Development with identity: Community, culture and sustainability in the Andes*. Oxfordshire: CABI Publishing, 2006.
- Subaharianto, Andang, et al. *Tantangan Industrialisasi Madura: Membentuk Kultur, Menjunjung Leluhur*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Subaharianto, Andang. *Madura Bicara PLTN*. Jember: Universitas Jember dan Kementerian Ristek RI dan Pusat Penelitian Budaya Jawa & Madura, 2004.
- Supi, Surya. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren: Studi untuk Mengembangkan Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Thesis M.Si. Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada Yohyakarta, 2009.
- Tai, Zxue. *The Internet in China Cyberspace and Civil Society*. London: Routledge, 2006.
- Taufiqurrahman, 'Islam dan Budaya Madura', bahan presentasi pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Bandung, 26-30 November 2006.
- Throsby, David. 'Culture In Sustainable Development: Insights for The Future Implementation of Art', in 13', *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of*

*Cultural Expressions.* Paris:  
UNESCO, 2008.

UNESCO. *Culture: a Driver and an Enabler  
of Sustainable Development.*  
UNESCO, 2012.

UNESCO. *The Cultural Dimension of  
Development: Towards a Practical  
Approach.* Paris: UNESCO  
Publishing, 1995.

WCCD. *Diversity: Summary Version.* Paris:  
WCCD, 1996.

World Bank. *Investing in a More  
Sustainable Indonesia: Country  
Environmental Analysis 2009.*  
Jakarta: World Bank Group, 2009

